

SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA SOPPENG

Andi Jenni Indriakati¹, Fahni Ananda², Jusmiati³

Program Studi Akuntansi, STIE Lamappapoleonro Soppeng

e-mail : andi.jemiindriakati@stie.ypls.ac.id¹, fahnyananda@gmail.com², umicumi2805@gmail.com³

ABSTRAK

Pengelolaan laporan keuangan telah mengalami kemajuan yang akuntabel dan transparan dalam semua aspek transaksi keuangan daerah. Anggaran belanja khususnya belanja modal merupakan hal yang sangat penting dalam penataan anggaran daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pengakuan atas belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebaiknya Pemerintah Kota Soppeng melakukan proses pencatatan dan penyajian semua transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bukan hanya pada belanja modal.

Kata kunci: Sistem, Akuntansi, Belanja Modal.

ABSTRACT

Management of financial statements has made progress that is accountable and transparent in all aspects of regional financial transactions. The budget especially capital expenditure is very important in compliance with the regional budget. The purpose of this research is to find out whether the capital expenditure accounting system at the Soppeng City Regional Financial Management Agency (BPKD) meets the requirements of a good accounting system. The method used in this research is descriptive method, which is to describe capital expenditure at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Soppeng City. The results of the study concluded that the process of recognizing capital expenditure at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Soppeng City has been carried out by following the regulations that apply to local governments and in accordance with Government Accounting Standards. Soppeng City Government should carry out the process of recording and presenting all financial transactions in accordance with financial accounting standards not only on capital expenditure.

Keywords: System, Accounting, Capital Expenditures.

1. PENDAHULUAN

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005).

Belanja pada pemerintah daerah sudah ditentukan anggarannya dalam APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung

merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan, dalam hal ini belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung di mana penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Karena belanja modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah aset daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja modal pada pemerintah daerah tersebut.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng sebagai Bendahara Umum Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (BUD SKPKD) menerapkan Sistem Akuntansi berbasis Kas menuju Akrual (*cashtoward accrual*) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Atas dasar pemikiran di atas maka dilakukan penelitian dengan judul "Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng".

1.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik.

1.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- Bagi Peneliti, untuk memperoleh tambahan ilmu sehingga penulismendapatkan gambaran nyata dari teori yang diperoleh di bangkuperkuliahan.
- Bagi Perusahaan/Instansi, dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Belanja Modal

Belanja di lingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan "sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas" (Nordiawan, dkk, 2007:187).

Menurut *Accounting Principle Board* (APB) *Statement* Nomor 4 (dalam Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto, 2012:168), belanja didefinisikan "sebagai jumlah, yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima".

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa belanja terjadi dikarenakan penggunaan aset (dalam segala bentuk) untuk kegiatan operasional entitas, sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas. Definisi tersebut diterapkan untuk lingkungan akuntansi di sektor swasta yang

menggunakan basis akrual dalam pelaporannya. Untuk akuntansi pemerintahan, karena basis akuntansi yang digunakan berbeda dengan swasta, maka perlu adanya definisi yang disesuaikan dengan lingkungan pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual (*cash towardaccrual*). Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan "sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah" (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005).

Maka definisi belanja modal yaitu: "belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan" (Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto, 2012:169).

2.2. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi memiliki pengertian masing-masing yang terdiri dari dua elemen yaitu: sistem dan akuntansi. Di mana setiap kata memiliki arti tersendiri, dan apabila digabungkan akan menghasilkan sebuah definisi yang baru. Adapun penjelasan tentang kedua elemen tersebut menurut para ahli. Menurut Hall (2011:6) "sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama".

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan "sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan" (Wareen, Reeve, Fess, 2008:10).

Menurut Mulyadi (2001:3), "sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan".

Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan, dalam proses akuntansi, terdapat

beberapa catatan yang dibuat, yaitu jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

Dalam konteks akuntansi keuangan daerah juga terdapat Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ini pun sejalan dengan konsep sistem akuntansi di atas dan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP yang menyebutkan bahwa "Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah". Oleh karena itu, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemda (Halim, 2008:52).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki contoh input berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Proses Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Output Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232).

2.3. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kerangka umum sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut (Ulum, 2004:249):

1. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (*software*) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan Kerja.

4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban Satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu *copy* dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen, satu *copy* untuk arsip Unit Perhitungan. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Menurut Agustine (2013:5) metode penelitian adalah sebuah aktivitas yang memberikan kontribusi dalam memahami fenomena yang menjadi perhatian melalui penelitian.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung untuk di analisa dan dibuat kesimpulan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Nasution (2015:126) Data Primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Pengumpulan data-data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

sistem dan prosedur penyusunan anggaran yang ada di kantor Dinas Sosial Soppeng.

2. Data Sekunder

Menurut Nasution (2015:126) Data Sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil survei, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data-data sekunder dalam penelitian ini melalui buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam TA ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam rangka penulisan laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh data yang benar, lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Interview yang penulis gunakan adalah jenis interview pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara. Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa interview dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main tetapi tidak kaku.

2. Observasi

Menurut Arikunto (2013:149) Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti metode pengumpulan data melalui data-data yang sudah ada. Menurut Arikunto (2013:149) Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, peraturan, surat, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, literatur-literatur ataupun artikel-artikel akuntansi, guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

3.4. Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam proses analisis data terhadap komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, kajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau bentuk naratif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data menurut Miles dan Humberman dalam buku Emzir (2013:20) yaitu:

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, chart, atau grafis, sehingga data dapat dikuasai.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data, pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan

Sebagai Bendahara Umum Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (BUD SKPKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng memiliki dua fungsi sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah). Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan Daerah mengelola laporan keuangan tiap-tiap SKPD yang kemudian akan dikonsolidasikan untuk diberikan kepada Kepala Daerah.

1. Sistem belanja akuntansi SKPD

Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

2. Sistem akuntansi belanja SKPKD

Akuntansi belanja pada SKPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk mencatat belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang hanya dilakukan oleh Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Soppeng

5. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Belanja Modal pada BPKD Kota Soppeng telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik karena telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Sistem Akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan daerah adalah sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).
3. Dokumen-dokumen yang digunakan terkait pelaksanaan sistem akuntansi belanja modal adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nota debit bank dan bukti pengeluaran lainnya, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Penyediaan Dana (SPD), dan berita acara serah terima barang/jasa.
4. Dalam sistem akuntansi, belanja modal diberi perlakuan khusus dengan melakukan pencatatan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan dua jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja dan yang lainnya untuk mencatat asset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

-
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Emsir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Graindo.
- Erlina, dkk. 2012. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. USU Press: Soppeng
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, James. A. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat. Salemba Empat: Jakarta.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Nasir, M. 2014. *Metode Analisis Deskriptif*. Yogyakarta: Erlangga
- Nasution, S. 2015. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ulum, MD Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Edisi Pertama. Malang: UMM Press.
- Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi USU
- Waren, Carl S, J.M Reeve dan P.E Fees. 2008. *Accounting – Pengantar Akuntansi*. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat